



Judul : Pendidikan kedokteran, jamin keselamatan dan insentif bagi dokter spesialis
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Jamin Keselamatan dan Insentif bagi Dokter Spesialis

JAKARTA, KOMPAS — Distribusi dokter spesialis terpusat pada layanan kesehatan di Pulau Jawa. Namun, persoalan kekurangan dokter spesialis ini tak bisa diatasi hanya dengan menambah jumlah dokter, tetapi harus dipastikan distribusi penempatan dokter yang aman dan penyediaan fasilitas hingga insentif dan jenjang karier.

Pendidikan dokter spesialis diharapkan tetap mengoptimalkan peran fakultas kedokteran (FK) di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diperkuat dengan rumah sakit pendidikan. Wacana menghasilkan dokter spesialis berbasis rumah sakit dalam draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan diminta tak tergesa-gesa.

Hal ini mengemuka dalam lokakarya yang diprakarsai Universitas Yarsi, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Acara ini dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Sundoyo; anggota Komisi IX DPR, Suir Syam; dan Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Budi Santoso.

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengutarakan, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia perlu dimulai dengan memetakan

demografi penduduk dan transisi epidemiologi. Dalam konteks rujukan, perlu spesialisasi bervariasi jumlah, kompetensi, dan distribusi.

Dari sisi penyediaan harus dikaji soal jumlah, jenis, jenjang, dan distribusinya, dengan komitmen pada pemerataan. Pergerakan dokter perlu dikaji oleh Kemkes, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pemerintah daerah secara transparan dan sesuai konteks lokal.

"Kami berharap para dokter spesialis mengalir ke tempat yang membutuhkan dengan kondisi kerja nyaman, jenjang karier jelas, dan terjamin kesejahteraan. Tak kalah penting sarana dan prasarana pendukung agar mereka optimal melayani kesehatan warga," tutur Fasli.

Menyesuaikan

Nizam menyebutkan, pemenuhan dokter oleh perguruan tinggi mengacu pada permintaan Kemkes. "Akselerasi jumlah dokter dan dokter spesialis bisa gotong royong dengan tetap mengutamakan mutu lulusan. Untuk pendidikan dokter spesialis, kehadiran pemerintah minim sehingga biaya pendidikan mahal," ungkapnya.

Jumlah mahasiswa spesialis saat ini 15.403 residen per tahun. Jika kekurangan dokter spesialis 32.000 orang ini bisa dipenuhi dalam tiga tahun dengan akselerasi.

"Ini membutuhkan gotong royong, rumah sakit pendidikan, dan pendanaan. Kalau Kemkes siap dengan rumah sakit pendidikan, bisa diakseleserasi dengan mahasiswa FK. Ada FK yang berpotensi membuka prodi spesialis yang dibutuhkan. Bisa ditingkatkan 14-25 persen," ucapnya.

Kapasitas peserta program studi pendidikan spesialis (PPDS) di FK bisa ditambah. Namun, perlu dukungan bagi rumah sakit pendidikan. Dari 800 rumah sakit yang potensial, baru 300 rumah sakit yang diakreditasi Kemkes jadi rumah sakit pendidikan.

Nizam berharap agar pemenuhan dokter didesain di RUU Kesehatan memanfaatkan sistem yang ada. Kemendikbudristek mengembangkan *Academic Health System (AHS)* karena pengembangannya mesti memenuhi ranah pendidikan dan pelayanan.

Sundoyo menegaskan, RUU Kesehatan dibutuhkan demi mendukung transformasi sistem kesehatan berorientasi preventif serta memudahkan akses layanan bermutu. Kekurangan terbesar ialah dokter spesialis urologi, spesialis penyakit dalam mahir dialisis, dan spesialis anak dengan nefrologi.

Budi yang juga Dekan FK Universitas Airlangga memutarakan, kekurangan dokter spesialis bisa diatasi jika sistem rujukan berjalan baik. Produksi dan perencanaan distribusi harus berjalan beriringan. (ELN)